



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UIP JBT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DJAROT HUTABRI EKO BUDI SANTOSO
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 195205

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 442 m²/144 m² di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.222.000.000

1. MOBIL, ISUZU MU-X SUV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 55.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 434.045.382

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.461.045.382

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.461.045.382

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.